

Upaya Menjaga Kestabilan dan Optimalisasi Jalur Distribusi Komoditas Strategis dalam Pengendalian Inflasi di Provinsi Papua Pegunungan

Meri Berliana^{1*}, Alber Tulak², Inrianti³

^{1, 2} Program Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena, Indonesia

³ Program Studi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena, Indonesia

merrysimatupang93@gmail.com^{1*}, bulunangko91@gmail.com²

Alamat: Jalan Sanger, Honelama, Wamena, Jayawijaya Regency, Papua 99511

Korespondensi email: merrysimatupang93@gmail.com

Abstract: This research aims to make efforts to maintain stability and optimize distribution channels for strategic commodities in controlling inflation in the Papua Mountain Province. The data used in this research is secondary data sourced from BPS and BRS. Secondary data in this research is data regarding changes in inflation from April to September 2024. The highest inflation occurred in June at 5.65% with a CPI of 111.29%. The method used in this research is qualitative descriptive research which utilizes literature, journals and official BI news from various related sources. The research results show a high level of inflation in the Papua Mountain Province as a newly expanded province. The government and BI must synergize by carrying out cheap market operations, carrying out market and distributor inspections, realizing BLT, strengthening domestic food security through the Food Estate Program, handling the impact of natural disasters and accelerating the development of agricultural infrastructure and expanding cooperation between regions and the center. To control the inflation rate in the Papua Mountain Province.

Keywords: Inflation, CPI (Consumer Price Index), Papua Mountain Province

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan upaya menjaga kestabilan dan optimalisasi jalur distribusi komoditas strategis dalam pengendalian Inflasi di Provinsi Papua Pegunungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari BPS dan BRS. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai perubahan inflasi pada bulan April hingga September tahun 2024. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan juni dengan angka 5,65% dengan IHK 111,29%. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memanfaatkan literatur, jurnal dan berita Resmi BI dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan Tingginya Tingkat inflasi di Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi yang baru di mekarkan. Pemerintah dan BI harus bersinergi dengan melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, merealisasikan BLT, Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui *Program Food Estate*, penanganan dampak bencana alam dan mempercepat Pembangunan infrastuktur pertanian serta memperluas Kerjasama antar daerah dan pusat. Untuk mengendalikan Tingkat inflasi di Provinsi Papua Pegunungan.

Kata kunci: Inflasi, IHK (Index Harga Konsumen), Provinsi Papua Pegunungan

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu negara maupun daerah. Pembangunan sektor ekonomi merupakan proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan Tingkat kesejahteraan masyarakat. Provinsi Papua Pegunungan merupakan Provinsi di Indonesia dengan ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Papua Pegunungan dimekarkan dari Provinsi Papua bersama dua Provinsi lainnya yaitu Papua Selatan dan Papua Tengah pada 30 Juni 2022. Provinsi Papua Pegunungan memiliki

8 kabupaten. Pada agustus 2024 terjadi inflasi year on year (y – on – y) sebesar 2,12% dengan indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,06. Inflasi provinsi y – on – y tertinggi di provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,05% dengan IHK sebesar 110,78 dan terendah terjadi di provinsiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,02% dengan IHK sebesar 103,78.

Merosotnya nilai uang (kertas) dikarenakan banyaknya uang yang beredar di masyarakat dan cepatnya uang beredar menyebabkan kecenderungan naiknya harga barang maupun jasa secara terus menerus saling pengaruh dan mempengaruhi merupakan ciri telah terjadi inflasi di suatu negara maupun daerah. Pada umumnya Inflasi berpotensi mengganggu perencanaan keuangan di masa yang akan datang dan menyebabkan harga barang dan jasa meningkat secara terus menerus serta berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara ataupun daerah. Selain berdampak Negatif pada sistem perekonomian, Inflasi juga memiliki sisi positif dalam pertumbuhan ekonomi, jika suatu Negara maupun Daerah mampu mengendalikan tingkat inflasi. Inflasi yang terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seperti meningkatkan pendapatan nasional, membuat masyarakat lebih bergairah untuk bekerja dan menabung serta berinvestasi. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat, kenaikan atau penurunan inflasi suatu negara pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. (Sarbaini & Nazaruddin, 2023). Selaras dengan penelitian tersebut indikator penting Inflasi sangat berpengaruh dalam menentukan harga pasar dari semua yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Inflasi sangat berpengaruh bagi para Investor atau pengusaha karena berkaitan dengan operasional perusahaan.

Pemerintah dan bank sentral perlu bekerja sama untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil dan tidak mengganggu keseimbangan ekonomi. Pengendalian inflasi menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan secara tidak langsung menjaga kesejahteraan rakyat (Ulhaq et al., 2023). Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (BANK BI 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk Berupaya menjaga Kestabilan dan Optimalisasi Jalur Distribusi Komoditas Strategis dalam Pengendalian Inflasi di Provinsi Papua Pegunungan. Dan penelitian ini diharapkan tidak hanya akan memberikan gambaran strategi-strategi pengendalian inflasi juga di harapkan bisa menjadi rujukan dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan strategi upaya pengendalian inflasi bagi Papua Pegunungan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Variabel penyebab terjadinya inflasi meliputi a) Permintaan yang berlebihan, b) Biaya produksi yang naik, c) Meningkatnya harga upah, dan d) Fluktuasi harga internasional. Meskipun inflasi ringan dapat mendorong konsumsi, inflasi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Deflasi, sebaliknya, adalah penurunan harga umum yang dapat menghambat pengeluaran konsumen dan investasi, serta berpotensi memicu perlambatan ekonomi. Upaya pengendalian inflasi melibatkan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat (Pujadi, 2022).

Dalam perancangan penelitian ini, penulis mempelajari beberapa studi kasus terhadap berbagai karya terdahulu berupa jurnal yang dinilai relevan dan mendukung penulisan dalam penelitian ini. Ada beberapa Jurnal yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang setiap bahasannya mendukung dalam keutuhan pembahasan penelitian ini. Dalam jurnal Fadilla Amir Salim & Anggun Purnamasari yang berjudul “Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa akibat dari kenaikan harga dari inflasi membuat masyarakat yang awalnya mampu untuk membeli suatu barang dan jasa, menjadi tidak mampu atau mengurangi konsumsinya terhadap barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhannya sehari - hari. (Fadilla & Purnamasari, 2021).

Jurnal yang kedua berjudul “Inflasi Teori dan Kebijakan” karya Arko Pujadi penelitian tersebut menjelaskan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi dimana harga-harga barang dan juga jasa secara umum mengalami peningkatan berkelanjutan dalam suatu negara maupun daerah dalam periode waktu tertentu. (Pujadi, 2022).

Dalam jurnal Deksa Imam Suhada, dkk yang berjudul “Efektivitas Para Pelaku Ekonomi dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” penelitian tersebut menjelaskan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara maupun daerah, diperlukan indikator yang dapat berfungsi sebagai tolak ukur, salah satunya ialah melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berperan sangat penting dan menjadi indikator yang dapat memberikan suatu gambaran terhadap dampak

nyata dari suatu kebijakan pembangunan. Suatu negara maupun daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di angka yang baik maupun ideal dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat di negara maupun daerah tersebut. (Suhada dkk., 2022)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Pegunungan, BRS dan sumber-sumber lain seperti media cetak, jurnal-jurnal, dan literatur-literatur lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang menunjukkan terjadinya perubahan Tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama kurun waktu tertentu. Pada Agustus 2024 provinsi Papua pegunungan menjadi provinsi tertinggi Tingkat inflasinya dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia dengan Tingkat Inflasi sebesar 5,05% dengan IHK sebesar 110,78 dan terendah terjadi di provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,02% dengan IHK sebesar 103,78.



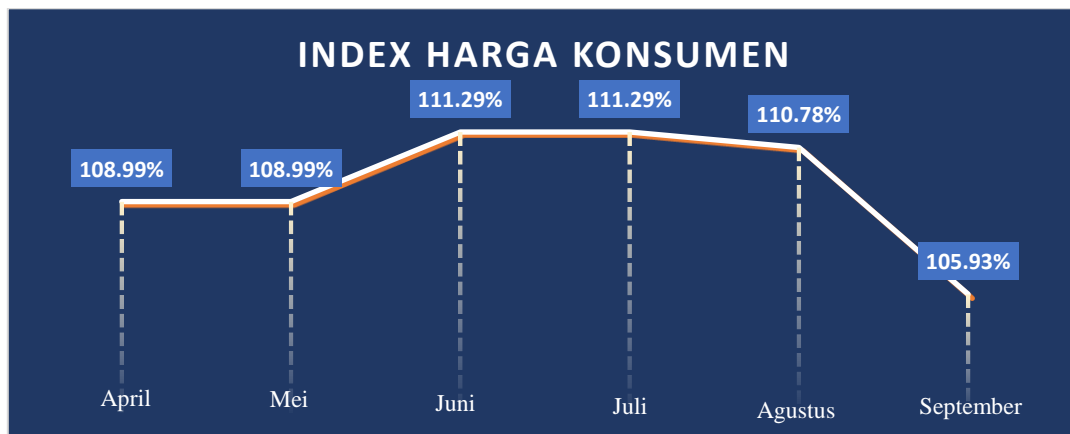
Gambar 1: Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Pegunungan (April – September 2024)

Source : Badan Pusat Statistik (2024)

Harga barang yang semakin mahal akibat inflasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut memaksa Masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih dari biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan masyarakat akan memilih untuk tidak menabung mengingat rendahnya nilai mata uang pada saat inflasi. Berikut gambaran perkembangan inflasi di Provinsi Papua Pegunungan.

Inflasi dapat diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI) Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- Indeks biaya hidup atau cost – of - living index (COLI).
- Indeks harga produsen : Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- Indeks harga komoditas: Indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- Indeks harga barang-barang modal.
- Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.



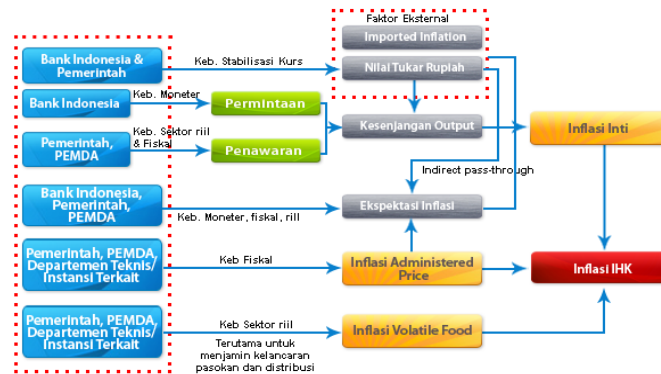
Gambar 2: Index Harga Konsumen untuk Provinsi Papua Pegunungan (April – September 2024)

Source: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan pengamatan dan observasi dari berbagai studi kasus, literatur dan jurnal serta penelitian terdahulu, peneliti melihat Tingkat Inflasi di provinsi Papua Pegunungan mengalami fluktuasi dan dengan angka yang cukup tinggi hal tersebut dapat di lihat dari sumber data yang di muat oleh Badan Pusat Statistik dan propinsi Papua Pegunungan sering kali menjadi provinsi dengan Tingkat inflasi tertinggi seIndonesia dari 38 Provinsi.

Pemerintah daerah harus bersinergi dengan Bank BI melakukan Langkah – Langkah strategis dalam menyikapi tingginya tingkat inflasi di provinsi papua pegunungan dengan berbagai cara maupun metode seperti:

- a. Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas Makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui *Program Food Estate*, penanganan dampak bencana alam dan mempercepat Pembangunan infrastruktur pertanian serta memperluas Kerjasama antar daerah dan pusat.
- c. Memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi
- d. Menjaga inflasi komponen *Volatile Food*, terutama pada hari besar keagamaan.
- e. Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi Masyarakat.
- f. Optimalisasi infrastruktur menjaga kelancaran distribusi.



Gambar 3: Strategi Pemerintah Daerah untuk mempengaruhi Inflasi di Provinsi Papua Pagunungan

Strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dapat dirumuskan melalui *Roadmap* seperti di atas merujuk dalam ketetapan yang telah tertuang di aturan manual Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Kerangka strategi yang dimaksud ialah dengan mengkhhususkan peran pemerintah daerah maupun provinsi melalui peran dalam kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengacu pada wilayah dan wewenang yang dapat dijangkau oleh pemerintah daerah maupun provinsi dengan maksud pengendalian inflasi Pemerintah daerah agar tetap rendah dan stabil.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian ini yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti Permintaan barang yang meningkat, biaya produksi yang meningkat, pergerakan uang yang berlebihan di masyarakat dan proses distribusi yang tidak merata. Efek negatif inflasi terhadap perekonomian Provinsi Papua Pegunungan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan tetap, karena pendapatan mereka tidak berubah ketika harga komoditas naik dan pendapatan tidak terdistribusi secara merata. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dengan pendapatan tetap.

Saran

Pemerintah daerah harus bersinergi dengan Bank BI serta menjalin komunikasi ataupun Kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah lainnya juga melakukan Langkah – Langkah strategis dalam Upaya menjaga Kestabilan dan Optimalisasi Jalur Distribusi Komoditas Strategis dalam Pengendalian Inflasi di Provinsi Papua Pegunungan. Peneliti memberikan saran dalam pengendalian inflasi yang sedang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yaitu dengan melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, merealisasikan BLT, Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui *Program Food Estate*, penanganan dampak bencana alam dan mempercepat Pembangunan infrastruktur pertanian serta memperluas Kerjasama antar daerah dan pusat. Memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi, Menjaga inflasi komponen *Volatile Food*, terutama pada hari besar keagamaan, Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi Masyarakat. Dan Optimalisasi infrastruktur menjaga kelancaran distribusi dalam mengendalikan Tingkat inflasi di Provinsi Papua Pegunungan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). *Provinsi Papua Pegunungan dalam angka 2024*. <https://papua.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/cb8c29a69d5c6f9b146e6375/provinsi-papua-pegunungan-dalam-angka-2024.html>

Bank Indonesia. (2024). *Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2622524.aspx#:~:text=Keputusan%20ini%20konsisten%20dengan%20arah,mendukung%20pertumbuhan%20ekonomi%20yang%20berkelanjutan.

Bank Indonesia. (n.d.). *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>

- Fadilla, A. S., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28. <https://doi.org/10.1234/ekonomica.v7i1.1234>
- Pujadi, A. (2022). Inflasi: Teori dan kebijakan. *Jurnal Manajemen Diversitas*, 2(2), 73–77. <https://doi.org/10.1234/jmd.v2i2.5678>
- Rizani, A., Norrahan, R. A., Harsono, I., Yahya, A. S., & Syifa, D. M. (2023). Efek inflasi terhadap daya beli masyarakat pada tinjauan ekonomi makro. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 344–358. <https://doi.org/10.1234/jimr.v1i2.9101>
- Sarbaini, & Nazaruddin. (2023). Pengaruh kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.1234/jtmit.v2i1.1122>
- Suhada, D. I., Rahmadani, D., Rambe, M., Fattah, M. A., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas para pelaku ekonomi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3201–3208. <https://doi.org/10.1234/jip.v2i10.3344>